



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan, Dirjen Perikanan Tangkap, Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara
Hari, Tanggal	:	Selasa, 18 April 2017
Pukul	:	10.21 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Dr. TB. Hasanuddin, SE., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	:	Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (<i>Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014</i>).
Anggota yang Hadir	:	PIMPINAN: 1. Dr.TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan) 2. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

3. Ir. Rudianto Tjen
4. Charles Honoris
5. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
6. Marinus Gea, S.E., M.Ak.
7. Bambang Wuryanto
8. Andreas Hugo Pareira
9. Djenri Alting Keintjem

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

10. Dr. Fayakhun Andriadi
11. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E.
12. Dave Akbarsyah Laksono
13. Yayat Y.Biaro
14. Venny Devianti, S.Sos.
15. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

16. Rachel Maryam Sayidina
17. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

18. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
19. H. Darizal Basir
20. Muhamad Afzal Mahfuz, SH

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

21. Ir. Alimin Abdullah
22. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

23. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
24. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
25. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

26. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
27. Dr. Sukamta

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

28. H. Moh. Arwani Thomafi
29. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
30. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

31. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
32. Prananda Surya Paloh
33. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
34. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

35. Ir. Nurdin Tampubolon, MM

Anggota yang Izin

- :
1. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol. (F-PDI Perjuangan)
 2. Tuti N. Roosdiono (F-PDI Perjuangan)
 3. Meutya Viada Hafid (F-PG)
 4. Tantowi Yahya (F-PG)
 5. Bambang Atmanto Wiyogo (F-PG)
 6. H. Ahmad Muzani (F-GERINDRA)
 7. Martin Hutabarat (F-GERINDRA)
 8. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M (F-GERINDRA)
 9. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. (F-GERINDRA)
 10. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
 11. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M. (F-PD)
 12. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)
 13. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (F-PAN)
 14. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)
 15. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)

16. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
17. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid.,MA (F-PKS)
18. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (F-PPP)

Undangan : 1. Dirjen HPI Kemlu, Ferry Adamhar, S.H., LL.M.
2. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian KKP, diwakili oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ir. Reza Shah Pahlevi, M.Sc., Ph.D.
3. Deputi IV Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolkam, Laksda TNI Dr. H. Sipahutar, M.Sc.
beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Kita mulai rapat dengar pendapat komisi 1 dengan para pejabat terkait Kita buka dan mengucapkan.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.21 WIB)

Karena belum memenuhi kuorum tidak enak saya kalau misalnya bapak-bapak saya mohon duduk di sebelah kiri kanan ya karena masih belum berganti baju sehingga kami sementara skors dahulu.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 10.21 WIB)

Skors kami buka.

(SKORS RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.28 WIB)

Alhamdulillah Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang diwakili dari Polhukam dalam hal ini diwakili kepada deputi 4 kemudian Dirjen Perikanan Tangkap mewakili Menteri Kelautan kemudian Dirjen HPI Kemlu Republik Indonesia. Dan di sini untuk Dirjen PUU Kemhumkam Republik Indonesia sampai sekarang ini belum hadir kemudian juga selamat datang pada senior kami barangkali atau ya di belakang propinsi, ya dengan Prof Ety juga, selamat datang.

Pada hari ini seperti bapak-bapak ketahui sebagai narasumber. Narasumber khusus dalam rangka pembahasan rancangan Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dengan Filipina. Kami mendapatkan surat untuk meminta persetujuan ratifikasi tentu ratifikasi itu adalah keputusan politik tetapi sebelum keputusan politik diputuskan bersamam, tentu kami harus mempelajari secara teknis di lapangan seperti apa. Kemudian banyak aspek yang harus kami pelajari dan pada hari ini tentu kami mengundang bapak dan ibu ke sini untuk untuk berdiskusi menyampaikan banyak hal. Yang kemudian kami akan simpulkan nanti setelah pertemuan-pertemuan itu menjadi sebuah keputusan politik, menolak atau meneruskan begitu atau barangkali ada catatan-catatan lain yang harus kami perhatikan. Untuk itu nanti di dalam akhir dari diskusi ini, barangkali kami tidak membuat sebuah kesimpulan ya tetapi pemahaman-pemahaman yang di sini oleh tim sudah disediakan akan dicatat dan itu nanti akan kami kompilasikan dengan pendapat-pendapat lain menjadi sebuah keputusan politik negara. Ketika sudah ada persetujuan ratifikasi itu karena sekarang baru diratifikasi oleh pemerintah dengan pemerintah.

Untuk itu nanti dimohon saya kira berturut-turut saja, nanti dipimpin oleh Pak Dirjen dari Kementerian Luar Negeri siapa yang paling duluan memberikan. Kemudian sesudah itu mungkin ada pendalaman-pendalaman dari rekan-rekan kami dan sesudah itu nanti kita tutup. Kalau

bapak dan ibu bisa cepat berkenan ya mungkin kita paling lama sampai pukul 13.00, setuju ya? Maksimal sampai 13.00 dilanjutkan dengan makan siang sudah tersedia pak. Sholat dan makan siang itu wajib, jangan telat waktunya ya supaya tidak sakit perutnya.

Saya kira sepakat jadi kita akan laksanakan secara terbuka atau tertutup? Terbuka baik terbuka dan untuk sementara sampai pukul 13.00.

(RAPAT SETUJU)

Baik kami silakan Pak Dirjen untuk mengatur paparannya terima kasih.

DIRJEN HPI KEMLU (FERRY ADAMHAR.,SH.,LL.M) :

Terima kasih pimpinan.

Yang kami hormati dan juga anggota Komisi I yang kami muliakan.

Kalau mohon izin 1 menit pak, saya menyampaikan apresiasi kami pak terhadap Komisi I atas kerja sama yang erat yang kita lakukan dalam rangka meratifikasi perjanjian batas teritorial kita dengan Singapura diselat Singapura bagian timur, yang merupakan suatu capaian yang luar biasa menurut hemat kami pak. Di mana kita sekarang-sekarang sudah mengimplementasikan seperti janji kita 1 komitmen Indonesia dan Singapura sebagai negara tetangga menyelesaikan semua perbatasannya. Nah itu perbatasan laut yang sangat penting di dunia pak dengan-dengan apa dengan *one mutual beneficial* pak.

Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih pak atas kerjasamanya yang mungkin dengan ini modal dasar bagi kita semua nanti kita akan melanjutkan dengan kerjasama-kerjasama lainnya antara pemerintah dengan DPR pak terima kasih sekali lagi pak. Yang ke depan memang kalau boleh kami infokan, kita akan mengimplementasikan *follow up* dari perjanjian itu yang-yang apa ya tentu kita wajib lakukan. Baik itu sama kita di pemerintahan dan juga dengan Singapura dalam pengertian bagaimana kita menyelesaikan hal-hal yang masih pending bukan beradu untuk itu tetapi implikasi dari itu.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik saya barangkali merespons terima kasih, juga mungkin mulai saja pemerintah memulai dengan yang paling kritis itu adalah di three junction itu ya? Nah kalau itu sudah oke barangkali maka akan ada banyak kepentingan-kepentingan yang kita dapatkan disana.
Terima kasih.

DIRJEN HPI KEMLU (FERRY ADAMHAR.,SH.,LL.M) :

Benar pak terima kasih. Kita akan mulai dari sana dengan Singapuranya pak nanti kita ke dalam juga pak.

Pimpinan yang kami hormati.

Bapak ibu sekalian anggota yang kami hormati.

Seperti yang kami utarakan tadi pak kalau di samping kami juga sudah ada beberapa pejabat tinggi dari KL terkait pak yang tentunya akan menambahkan keterangan yang kami berikan secara umum dulu. Kalau mohon izin kami boleh meminta bapak ini memperkenalkan dirinya pak, mewakili ini. Silakan dari sebelah kanan, silakan pak memperkenalkan diri.

MENKOPOLHUKAM:

Terima kasih bapak.
Selamat pagi bapak.

Kami deputi 4 Menko polhukam Laksamana muda TNI Halimun Sipahutar.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP :

Terima kasih bapak.

Perkenalkan nama saya Reza dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mewakili bapak Direktorat Jenderal.

LAKSAMANA PERTAMA (MINTORO YULIANTO):

Izin bahwa pimpinan saya Laksamana Pertama Mintoro Yulianto WA Asop Kasal pak.

Terima kasih.

LAKSDA TNI (HARJOSUMORO) :

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Saya laksda TNI Harjosumoro, Kapus Hidro AL pak.

Terima kasih.

STAF AHLI HUBUNGAN KELEMBAGAAN (SALMAN ALFARISI) :

Assalamu'alaikum.

Saya Salman Alfarisi staf ahli bidang Hubungan Kelembagaan Kemlu.

DIREKTUR PENGAMANAN KERJASAMA PERBATASAN TNI AL :

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Saya Kolonel Yanuar, Direktur Pengamanan Kerjasama Perbatasan push hidros TNI AL.

DIRJEN HPI KEMLU (FERRY ADAMHAR.,SH.,LL.M) :

Terima kasih.

**Bapak ketua komisi yang kami hormati,
Dan bapak-bapak ibu anggota komisi yang kami muliakan.**

Pada hari paparan yang akan kami sampaikan secara singkat akan menjelaskan tentang pertama, latar belakang bertujuan batasi IIC RI. Yang ditandatangani di Manila, 25 Mei 2014 khususnya mengenai proses perundingannya. Kedua prinsip penarikan garis batas IIC RI dengan Philipina. Ketiga manfaat yang dilakukan pengesahan terhadap persetujuan yang telah disepakati.

Sebagaimana diketahui kami sekarang beranjak ke latar belakang pak. Sebagaimana diketahui perundingan perbatasan IIC dan RI Filipina telah berlangsung dalam periode 194 dan 2014 atau lebih kurang 20 tahun. Secara politis kedua negara pertama kali bertemu dalam forum The First Senior Official Meeting On The Limitation Maritim Boundary. Yang dilaksanakan di Manado tanggal 23-25 Juni 1994. Pada tingkatan ini penandatanganan IIC dilaksanakan melalui forum pertemuan Joint Permanen Working Group on My Time and Ocean Concern atau DPWG MOC. Pertemuan DPWG MOC secara total telah melaksanakan 9 pertemuan. Pertama DPWG MOC pertama dilakukan di Manila pada tanggal 1 dan 5 Desember 2003 dan DPWG MOC terakhir dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8-10 Juni 2016.

Dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan perundingan kedua telah menyepakati prinsip-prinsip bahwa perundingan akan dilakukan dengan prinsip unclosed 18 1982 yaitu kedua garis batas IIC antara Indonesia dan Filipina bertolak dari Sepangkal kepulauan. Hal ini dapat menjadi preseden baik bagi Indonesia, Filipina maupun dengan negara-negara kepulauan lainnya yang terus mengimplementasikan konsep negara kepulauan dalam penetapan garis batas maritim.

Bapak ibu sekalian yang kami hormati.

Bagian selanjutnya akan menjelaskan mengenai hasil akhir garis batas IIC RI-Filipina yang telah disepakati. Selain ini memperlihatkan kawasan perbatasan maritim Indonesia dan Filipina yang membentang dari perairan laut Sulawesi di sebelah barat dan laut Filipina di sebelah timur. Mempertimbangkan luasnya wilayah delimitasi tim teknis kedua negara membagi pembahasan IIC ke dalam 5 segmen dan konstruksi garis batas IIC sebagaimana terlihat dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi PBB dengan cumlaude 1982. Dan juga Calos yaitu manual on timical aspect of United Nation Convention ... Audecy 1992. Adapun secara teknis garis batas IIC kedua negara terdiri 8 titik. Titik kelok yaitu turning points yang membentang sepanjang 627,5 mile laut atau setara dengan 1 kilo 1161,13 kilometer.

Gambar ini menjadikan lampiran naskah persetujuan Republik Indonesia dengan Filipina mengenai pembatasan GTI. Dengan ditandatanganinya persetujuan RI-Filipina mengenai batas IIC tersebut Indonesia memperoleh luas laut perairan ZEE sebesar 218.950 kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Filipina yang hanya memperoleh luas perairan sebesar 170.150 kilometer persegi Indonesia memperoleh perairan yang lebih luas sekitar 48.440 kilometer persegi dari pada Filipina.

Bapak ibu sekalian.

Garis batas IIC dengan Filipina, RI dengan Filipina telah disepakati melalui perjanjian tanggal 23 Mei 2014, ini merupakan capaian yang luar biasa. Dengan disepakatinya persetujuan ini Indonesia memperoleh manfaat antara lain, pertama memberi kepastian hukum garis batas IIC kedua negara.

Kedua, menjamin pelaksanaan hak-hak berdaulat Indonesia di perairan tersebut khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, pertahanan keamanan dan pengelolaan sumber daya energi dan mineral yang terkandung di perairan tersebut. C.menjamin hak nelayan lokal di samping upaya pengelolaan perairan di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina khususnya dalam mencegah dan menindak kejahatan IU Fishing. Dan d.manfaat ekonomi untuk membangun perekonomian Indonesia di bagian timur serta manfaat-manfaat lainnya.

Bapak ibu sekalian yang kami hormati.

Hal ini tentunya dicapai dengan adanya *political will* dan *trust* dari kedua negara secara khusus hasil persetujuan ini menunjukkan implementasi Indonesia dan Filipina terhadap prinsip negara kepulauan kedua negara sesuai dengan konvensi hukum laut 1982.

Bapak Ini merupakan faktor pendukung yang kami lihat merupakan hal-hal yang dapat kami sampaikan di sini. Untuk ini kami, bapak ibu sekalian yang saya hormati sebagai diketahui kita juga mengetahui bahwa 4 April, Komisi I menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan dengan para pakar dan akademisi.

Untuk ini selain pertanyaan-pertanyaan di atas, tentu pihak pemerintah perlu mengantisipasi pertanyaan yang lainnya. Untuk ini, pemerintah dengan teman-teman *full* di sini kita bersedia bersiap untuk melaksanakan pembahasan lebih lanjut. Dalam pertemuan ini kesamaan pandangan dan posisi pada tahap lanjutan pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR RI.

Demikian sambutan pengantar dari kami, pimpinan siding. Dan nanti kita akan menjawab atau mulai menjelaskan terhadap hal-hal yang nanti kita angkat di dalam pembahasan ini.

Demikian pak.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik silakan barangkali diatur, dilanjutkan ke sebelah kiri Deputi 4 barangkali ya?

DEPUTI IV PERTAHANAN POLHUKAM (LAKSDA TNI DR.H.SIPAHUTAR) :

Bapak ketua dan bapak-bapak yang kami hormati.

Ini adalah pengantar dari pemerintah pak, mengenai persiapan pembahasan RUU ratifikasi antara perjanjian perbatasan ICC antara Indonesia dengan Filipina. Dari keterangan ini, kami pada saat ini, ini keterangan pemerintah pak, tentunya kami akan membuka sekalian untuk pembahasan lebih mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan yang datang dari anggota yang kami muliakan.

Demikian pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik jadi dilanjutkan langsung ke pertanyaan pendalaman ya? Tadinya saya pikir mengundang menteri atau deputi wakil itu menyampaikan misalnya dari Deputi 4, masalah pertahanan negara, itu dengan diratifikasinya ini maka dari sisi pertahanan itu ada aspek bla bla begitu untuk meyakinkan kami, itu kira-kira.

Lalu dari Dirjen Perikanan Tangkap, ini ada banyak kasus yang ini ini ini dengan ada kepastian yuridis setelah MoU kemudian dibuat kemudian kita ratifikasi, maka ada kepastian ini-ini ini. Lalu aspek yang harus diperhatikan itu adalah ini ini ini begitu. Dari yang biasa kerjasama di perbatasan di sini hadir misalnya ini begini-begini, disarankan kepada pemerintah itu begini-begini begini ke depannya sehingga didalam membuat draft nanti narasinya kami banyak masukan dari bapak-bapak untuk ditambahkan, tadinya begitu. Yang ingin kami tangkap masalah-masalah teknis masalah politiknya, biar kami begitu tapi baiklah barangkali kalau tidak ada paparan lain.

Baik saya kira dari Deputi 4, silakan pak.

DEPUTI IV PERTAHANAN POLHUKAM (LAKSDA TNI DR.H.SIPAHUTAR) :

Terima kasih bapak.

Kami dari Deputi 4 Menkopolhukam menyampaikan kami telah mempelajari draft pengesahan batas ZEE RI-Filipina ini dan dari Deputi 4 Menkopolhukam sangat mendukung. Selama ini memang menjadi kendala bagi kita dengan perbatasan RI dengan Filipina ini. Terutama di ZEE dengan akan ditetapkannya disahkannya batas garis ZEE Filipina dari sisi pertahanan negara, kita mempunyai dasar berpijak yang jelas. Dengan ini kita telah melaksanakan tugas-tugas di perbatasan negara, bisa mengambil posisi yang sesuai dasar hukum yang jelas sehingga semua pelaksanaan pertahanan negara dapat berjalan dengan baik. Ini yang kita harapkan juga segala perkara perundingan terkait dengan batas wilayah kita ini, bisa menjadi langkah lebih maju lagi karena dengan adanya pengesahan batas ZEE RI-Filipina ini.

Selama ini kita mempunyai permasalahan di perbatasan baik kapal-kapal TNI AL, apalagi kita mengetahui bahwa banyak beberapa kasus yang terjadi tentang penanganan waktu beberapa saat yang lalu SP Nurhana kita tangkap. Kemudian malah kita ada problem hilangnya 4 awak kapal kita. Kemudian menjadikan mereka mengaku tidak berada di posisi masih diperdebatkan dengan adanya batas ZEE ini juga pengelolaan kekayaan alam antara RI-Filipina bisa lebih jelas sehingga merupakan hal yang positif bagi Indonesia.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik saya kira itu menguatkan kami dalam aspek pertahanan. Nah dalam aspek urusan perikanan tangkap, saya mohon pendapat dari bapak begitu ya.

DIR PENGELOLA SUMBER DAYA IKAN :

Terima kasih bapak pimpinan.

Dengan adanya kejelasan mengenai batas antara Indonesia dan Filipina khususnya di perairan utara Sulawesi, kami merasa ini akan sangat tepat. Sebagaimana kita ketahui bersama bapak pimpinan, kementerian kami sedang menegakkan combating AU fishing. Jadi dengan adanya batasan yang jelas ini, tentunya kita akan sangat mudah manakala ada nelayan-nelayan dari Filipina yang melintasi batas yang sudah kita tetapkan ini, untuk segera kita bisa tindak sesuai dengan garis batas yang sudah sepakati.

Yang kedua bapak pimpinan, nelayan kami di sekitar perairan ini sangat banyak. Jadi dengan adanya kejelasan mengenai batasan ini jumlah nelayan yang saat ini beroperasi di WPP RI 716. Jadi wilayah ini bapak pimpinan adalah wilayah pengelolaan perikanan NRI 716 Negara Republik Indonesia 316. Dan pada tahun 2015 berdasarkan data statistic, ada sekitar 107.182 nelayan.

Jadi saya kira ini sangat baik untuk nelayan kita agar ada kepastian hukum sampai di mana mereka bisa menangkap ikan. Juga dari luar sampai di mana mereka sudah bisa memasuki perairan kita. Belum lagi bapak pimpinan kalau dilihat dari kapal yang beroperasi di wilayah pengelolaan RI 716 ini cukup banyak. pada tahun 2015 itu sebanyak 152 kapal ukuran di atas 30 gross ton pak. Dan kalau kita melihat juga potensi sumberdaya ikan yang harus kita jaga pak di wilayah 716 ini, sebanyak 478 juta ton per tahun pak potensinya. 478 juta ton per tahun, jadi ini memang sangat potensinya pak potensinya sangat besar pak. Jadi saya kira memang dengan berbagai jenis ikan pak pimpinan. Jadi dengan berbagai jenis ikan yang utamanya tuna cakalang pak. Jadi cakalang sekitar 27,39 % dan ikan layang sebanyak 18,34 %.

Kemudian untuk pelabuhan perikanan kita juga yang beroperasi di sana yang perlu kita kembangkan manakala sudah jelas batasnya sehingga kita harapkan nelayan-nelayan bisa dengan pasti memanfaatkan pelabuhan perikanan manakala mereka sudah menangkap di sekitar perairan di sana. Pelabuhan perikanan samudra ada 1 pak, pelabuhan perikanan nusantara ada 1 kemudian pelabuhan perikanan pantai ada 3 dan pangkalan pendaratan ikan 35 pak, jadi sangat banyak sekali, totalnya ada 40 pak sekitar wilayah pulau perikanan 716.

Kemudian mungkin perlu kami sampaikan juga, perlu kami informasikan pak, terkait dengan kapal yang sudah ditangkapi ini pak oleh pengawas kami, dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan pada tahun 2017 di WPP NRI 716 ini pak. Jadi ada 4 kapal dari Filipina yang sudah tertangkap dengan gross ton berkisar 2 gross ton, 1 sampai 2 gross ton. Memang kecil-kecil pak jadi dengan adanya garis batas yang jelas mudah-mudahan nelayan kita juga akan mudah untuk mengamati keluar masuknya nelayan mereka yang gross tonnya kecil-kecil ini di perairan kita.

Demikian barangkali bapak pimpinan yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik terima kasih pak.

Itu poin yang ingin kami dapatkan begitu sehingga secara politis kami bisa pertanggung jawaban kepada rakyat kira-kira seperti itu. Kami kan tidak tahu itu tadi ada potensi sekian juta begitu. Sekian % tuna dan lain sebagainya, tuna pun kita mungkin tidak kebeli ya, begitu langsung diekspor ya? Terima kasih itu yang kami ingin dapatkan lebih dari sisi pertahanan. Nah sekarang dari lapangan barangkali. Nah itu tadi itu kan ada 1 titik yang kita akan ratifikasi batasnya itu. Nah menurut bapak-bapak di lapangan ini sudah benar atau belum? Ini sudah cocok atau belum? Karena kan dulu pak kami boleh masuk ke wilayah ini. Jangan seperti terjadi kasus camar bulan nah begitu. Ya mau ratifikasi ternyata sudah di lapangan pak tidak belok tapi lurus, nah begitu sehingga kita kehilangan. Itu tidak-tidak seperti itu, jadi sekarang yang biasa ke lapangan patroli di laut dan lain sebagainya, coba mungkin dari Angkatan Laut dan dari dinas-dinas lain kami minta pendapatnya.

Terima kasih.

LAKSDA I TNI GUNTORO YULIANTO:

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih bapak pimpinan.

Proses untuk perundingan batas maritim ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Dan kemudian pada saat itu push hidros dalam hal ini Angkatan Laut melalui push hidros ini sudah ikut aktif untuk melaksanakan perundingan itu.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Tetapi bapak dilibatkan ya tentunya karena di lembaga bapak ya?

LAKSDA I TNI GUNTORO YULIANTO:

Kami dilibatkan jadi Angkatan Laut memerintahkan kami untuk selalu terlibat dalam proses ini sehingga kami mengikuti sehingga setelah dilaksanakan persetujuan bahwa proses ini sudah selesai. Artinya kita sudah final dengan Filipina setelah 20 tahun sudah sah. Kemudian kita mulai merasakan rapat-rapat yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri untuk menyusun tentang ratifikasi Undang-Undangnya. Kita merasa sangat penting karena setelah ini tindakan kami khususnya push hidros itu untuk menentukan menggambarkan secara resmi batas ZEE. Dan ini sudah dilaksanakan kerja sama dengan Filipina untuk menggambar secara bersama dan ini sangat penting. Kalau misalnya tidak digambar ini akan menyulitkan kaitan dengan aparat keamanan yang di laut. Karena untuk mengetahui apakah pelanggaran ini terjadi apabila ada kapal-kapal asing apakah terjadi pelanggaran atau tidak, sangat tergantung dari pemetaan itu. Sehingga ini juga sangat bermanfaat sehingga apabila ini bisa diratifikasi maka kita akan tidak kesulitan untuk menggambarkan. Selama ini yang penggambaran ini adalah 1 unilateral artinya penggambaran claim kita. Claim kita yang sudah memang ada tapi itu adalah sebelum perjanjian. Jadi selama ini digambarkan hanya yang sudah oke yang sudah sepakat, toh kita gambarkan, yang belum unilateral.

Nah sekarang sudah sepakat, semuanya sudah sepakat. Artinya sudah-sudah resmi disetujui oleh Filipina dan kita setuju oleh Filipina tinggal untuk mengundang sehingga kita akan gambarkan untuk mempermudah kita aparat keamanan di laut. Yang berikutnya lagi kaitannya setelah ini kita akan melanjutkan dengan Malaysia yaitu yang di batas paling barat, sisi barat itu masih ada 5 % kalo enggak salah yang belum 5 %. Karena tidak bisa ditentukan hanya dengan Indonesia dengan Filipina itu dengan-dengan Malaysia juga. Karena untuk menemukan 1 titik itulah yang kemudian dia akan menyambung. 1 titik yang untuk *Three Junction Poin* itu harus disepakati secara trilateral Malaysia dan kita. Di daerah di situ yang sangat penting

karena sekarang sedang ramainya masalah penculikan dengan kegiatan-kegiatan apa namanya penculikan kita akan tahu dan penggambaran yang jelas terjadinya di wilayah mana. Kalau di wilayah Indonesia maka Indonesia punya peran yang sangat penting untuk mengambil aksi. Kalau seandainya ternyata terjadi di wilayah Filipina atau di Malaysia kita kan tahu siapa yang harus beraksi, dan siapa yang membantu dan siapa yang menjadi sentral untuk menangani tersebut. Dengan adanya Undang-Undang ratifikasi Undang-Undang ini, ini sangat membantu untuk kita yang di lapangan tadi untuk menentukan siapa yang harus berbuat apa.

Demikian pak terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik terima kasih laksamana.

Saya kira *clear* dan jelas kalau bahasa Jawanya tuh *eces* lah ya. Itu yang ingin kami dapatkan, baik teknis maupun taktis. Keputusan politis ada di kami, tentu kami akan untuk mengambil sebuah keputusan ya kalau itu menguntungkan untuk negara dan bangsa dari lapangan sudah benar tidak ada alasan kami tidak meratifikasinya.

Bapak dan ibu sekalian.

Saya kira kita masuk ke mungkin ada pertanyaan, Pak Alimin mungkin nanti saya silakan berturut-turut ya. Kemudian nanti kita diskusi tanya jawab.

Ya kami persilakan Pak Alimin.

F-PAN (IR.ALIMIN ABDULLAH) :

Terima kasih pimpinan.

**Rekan-rekan yang kami hormati,
Bapak-bapak undangan kami.**

Membahas sesuatu yang memang sudah 20 tahun kita idamkan pak ya. Mungkin baru sekarang kita rasakan mendesak pak, karena cukup lama 20 tahun perundingan ini. Nah sekarang mungkin tambah terasa penting ya pak ya? Jadi kami dari Komisi I ini pak, seperti kata pimpinan kami, sebetulnya yakin sih kami harus mendukung ini. Karena ini sesuatu yang sudah dibuat cukup lama dan serius. Dan akhir-akhir ini memang kita merasakan, baik dari *illegal fishing* yang lebih rame lagi kita ini sekarang culik-menculik ini pak.

Nah saya berharap walaupun ini adalah tentang ZEE jadi apa tentang ekonomi eksklusif tetapi yang berkaitan dengan ekonomi kan banyak pak. Rekan-rekan kita yang kapalnya ditangkap oleh Abu Sayap ini, itu kan juga kegiatan ekonomi itu pak, mengantarkan batu bara ke sana. Jadi kaitannya jelas kalau di daerah kita seperti kata ketua, saya kira ini kita harus sampai ke sana berundingnya pak. Kita punya hak, mengamankan negara kita, kalau perlu kita tembak, kita tenggelamkan pak. Bukan hanya kapal ikan kita tenggelamkan apalagi sudah menyangkut harta dan nyawa rakyat kita. Saya kira memang harus sampai di sana nanti bagaimana cara membuat kesepakatan lebih komplis karena itu lebih kita perlukan.

Jadi menyangkut keamanan itu baik keamanan kekayaan kita seperti ikan-ikan tetapi menyangkut penduduk kita pak, harta kita, menyangkut kegiatan ekonomi kita. Nah sekarang menurut saya itu sudah mengganggu gitu. Nah mudah-mudahan dengan ada ini kita sudah agak berubah pak. Ya selama ini katanya saya tidak tahu, kita sih *free* tidak ngasih duit tapi kata orang yang akan angkat terus kalau kita tidak kasih duit. Katanya, saya tidak tahu mana yang betul. Di negara dalam keadaan susah kita pilih yang mana yang mau kita pegang omongannya. Statistik saja kadang-kadang beda datanya tapi yang jelas menurut saya itu merupakan suatu gangguan yang kalau ada jelas batasnya kita bisa tahu batas mana yang kita bisa tindak, batas mana yang

kita minta tetangga tindak, tapi harus ditindak pak. Kalau dari pihak sana juga yang diganggu minta bantuan kita, kita juga siap sajalah kesepakatan. Saya kira begitu kan pak, harus kita masuk, kita mendesak dia juga menindak orang dia yang menanggu kita karena di daerah dia. Dan kita juga siap menindak kalau dia berada di kita. Nah ini barangkali yang tentu bagaimana caranya dalam Undang-Undang nanti juga masuk yang dipertimbangkan untuk dibicarakan, tidak sekedar hanya garis batas yang kita ketahui tapi tidak punya implikasi terhadap keamanan negara, keamanan rakyat, keamanan ekonomi kita.

Nah selama ini kan kita ini, banyak juga yang sudah teriak teriak ikan kita dicuri orang tapi kan kita cuma teriak-teriak saja pak. Kita cuman merasa punya potensi, seperti beliau itu tadi sekian juta ton segala macam, saya tidak tahu bagaimana cara ngitungnya kira-kiralah itu pak ya. Bahkan lebih hebat lagi sudah tahu prosentase yang tuna berapa, yang ini berapa, luar biasa itu kita tapi kita cuma tahu angka pak.

Nah kalau menurut orang tua saya kalau ngeramal saja tidak kita ambil pak, itu namanya dukun pak. Kita ngeramal nagih hujan tapi kita tidak siap payung, tidak siap jas hujan, itu namanya dukun ramalannya benar tapi dia basah kuyup. Ramalan kita ini ikan benar pak, saya yakin benar itu tapi yang mengambil orang lain.

Nah ini kan luar biasa, kalau menurut orang tua saya ini orang seperti itu termasuk kaya orang primitif katanya. Tahu suatu potensi di alamnya tapi dia tidak membuat apa-apa. Kata bapak saya orang primitif 2 saja cirinya pak. Yang pertama dia tidak mengubah apa-apa. Jadi begitu dia haus, air ini tidak dijadikan kopi seperti ini tapi diminum saja pak, dia laper buah dimakan enggak dikupas enggak direbus, tidak digoreng, dia makan. Dan tidak ada juga sisa buat besok. Masuk buah tidak bawa air, tidak bawa buah, itu primitive. Jadi kita punya potensi tapi diambil apa padanya semampu kita. Air sebegitu banyak ngalir cuman diambil buat minum tidak bisa diubah jadi listrik, itu primitive.

Nah di laut ini menurut saya kita masih dekat-dekat ke situ pak, potensinya besar, diambil orang kita tahu, kita tidak mengambilnya. Nah yang lebih parah lagi yang terakhir orang kita mau bisnis ekonomi ditangkap orang. Ujung ujungnya yang damai yang saya katakan tadi itu pak, ada 2 pendapat ada yang bilang kita luar biasa negosiasinya *free* begitu, ada yang bilang dia tidak nangkap terus lagi kalau tidak dapat sesuatu. Mana yang betul saya tidak tahu tetapi mudah-mudahan yang benar yang baik saja.

Nah pada saat itu membuat ini nanti mengesahkan ini, mudah-mudahan itu teratasi pak. Kalau enggak 20 tahun kita bekerja keras ini ya dapat batas saja kita, tidak ada sesuatu yang bisa kita membela kekayaan negara kita, membela bangsa kita.

Nah saya harap seperti yang bapak tadi tahu dan saya yakin kalau memang ini disahkan itu TNI kita siaplah kalau cuman Abu sayap saja begitu. Cuman harus diberi wewenang dia untuk menindaknya itu, diakui sama negara lain juga, apalagi dia bukannya tentara Philipina tapi kan perampok saja. Sekarang ini sebetulnya buat suatu negara besar kaya kita ini terganggu itu pak, kehormatan kita, bangsa kita karena kita tidak menegakan, hanya bisa berdamai. Saya kira enggak begitu kalau perlu kita ajak Philipina, Philipinanya kita tumpas dia. Karena di negara dia harus mengajar dia kan pak, dia yang ada di sana kalau di negara kita bilang, kita siap di depan bantu saja, identitas itu siapa orangnya. Kalau tidak ini lama-lama akan meningkat pak. Perompak-perompak seperti ini dan kita batasan kita perluas sekali. Sekali dia berhasil di sini, nanti yang di tempat lain juga akan jalan. Mungkin dengan Singapura mungkin dengan batasan-batasan kita yang lain.

Saya kira tidak boleh tidak biarkan orang menganggap kita lemah. Jadi mudah-mudahan segera kita bisa sahkan ini. Diakui oleh 3 negara tadi pak dan juga yang namanya Abu sayap itu orang tahu bahwa kita sekarang bisa menentukan batas kita dan menindak kalau dia juga macam-macam di daerah kita. Sekalipun dia di daerah negara lain, kita juga bisa kerja sama untuk menindak dia. Kalau enggak itu jadi musuh bersama kalau mereka tidak diganggu hanya kita itu lebih berat lagi kita mendesaknya. Anda diamkan karena tidak mengganggu anda, mengganggu kami. Nah itu bisa ribut kita pak sesama negara bersahabat menurut saya. Jadi ini harus ada ketegasan ketika kita nanti menetapkan ini bahwa terhadap itu kita minta juga pengertian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Kami persilakan Pak Arwani.

F-PPP (H.M.ARWANI THOMAFI) :

Ya terima kasih.

Telah banyak disampaikan, pada prinsipnya saya selaku anggota Komisi I juga memandang pentingnya garis batas ZEE ini yang sudah dibahas beberapa waktu segera disahkan. Karena memang kalau kita lihat potensi manfaat yang cukup besar keuntungannya bagi kita. Tidak hanya bagi kita saja tentunya dalam sebuah kesepakatan ini tentu pihak dari Filipina juga tentu mengambil keuntungan, ya sama-sama mengambil keuntungan, ada kejelasan posisi sehingga bisa memberikan 1 ketegasan sikap bagi kedua belah pihak, kedua negara khususnya dalam hal perekonomian tentunya.

Nah yang menjadi pertanyaan salah satunya adalah terkait dengan posisi garis batas ZEE ini. Jadi ini harus betul-betul dipastikan dalam kajian seluruh pihak ini memang betul-betul tidak ada persoalan lagi. Kepastian terkait dengan tidak adanya persoalan terkait dengan garis batas inilah yang perlu sekali lagi disampaikan oleh pihak pemerintah untuk betul-betul pada nantinya manfaat yang kita dapatkan dalam pengesahan ini tidak hanya terkait soal ekonomi saja ya. Terkait juga soal pengelolaan wilayah atau kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi juga mampu melancarkan arus pembangunan perekonomian di wilayah tersebut ya. Jadi ini penting untuk dipastikan kembali sehingga dalam bentuk yang lebih detail saya kira. Tidak hanya pernyataan-pernyataan ataupun dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan semata. Jadi pada intinya selain manfaat-manfaat pengesahan yang sudah disampaikan itu tentu hal-hal lain potensi-potensi kerugian apa yang masih ada celah yang harus kita antisipasi dari eksese apa pengesahan ini.

Jadi itu barangkali dari saya, sekali lagi perlu dicermati apakah ada faktor-faktor ataupun celah-celah eksese negatif dari pengesahan ini kalau soal manfaatnya, tentu kita sudah baca dan dukung semua tetapi barangkali ada hal-hal kajian-kajian yang masih menyisakan celah-celah ataupun kekurangan-kekurangan dari pengesahan ini. Perlu dipertegas dan diberikan pernyataan bahwa itu tidak ada masalah untuk ke depannya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Saya persilakan Ibu Nur.

F-PD (DR.HJ.NURHAYATI ALI ASSEGAF.,M.Si):

Terima kasih pimpinan.

Bismilah hirohman nirohim,

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati pimpinan rapat,
Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,
Dan bapak-bapak yang hadir.**

Terima kasih saya tadi sudah mendengarkan paparannya bagus, saya mengapresiasi capaiannya yang sudah dipaparkan tadi. Ini menarik sekali pak karena kebetulan di Badan Kerja Sama Antar Parlemen, nanti pada bulan Juli tanggal 17 sampai 20, kami akan melakukan pertemuan parlemen ASEAN. Nah salah satu dari tema yang akan kami bahas adalah Peace and Resolution to Conflict, antara lain ini. Jadi tidak hanya konflik mengenai Laut China Selatan tapi kami akan juga membahas tentang masalah-masalah perbatasan.

Kami menyadari bahwa parlemen saat ini mempunyai pengaruh yang cukup besar kepada pengesahan dan lain sebagainya di era demokrasi ini, parlemen memang punya peran yang sangat signifikan. Oleh karenanya saya berharap bahwa kami bisa mendapatkan masukan yang lebih detail, kami sudah berkoordinasi dengan Kemenlu tapi hal ini tidak sempat terungkap begitu ya.

Jadi saya kira di mana saja nanti yang bisa karena Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini selalu mengundang, mengajak Kementerian Luar Negeri dalam hal baik merumuskan tema maupun merumuskan masalah. Karena kami DPR mempunyai fungsi melaksanakan peran diplomasi dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen merupakan salah satu alat kelengkapan yang bertanggung jawab atas peran diplomasi membantu DPR, Pimpinan DPR dalam hal peran diplomasinya.

Oleh karenanya pak nanti tolong ya selain ini-ini, ini sangat menarik karena kami akan bicarakan juga, di dalam hal itu. Kemudian juga saya minta Kementerian Luar Negeri juga apabila ada hal-hal yang begini sebaiknya memberitahukan juga kepada kita, mengajak supaya kami mengajak dari TNI untuk ikut terlibat. Mungkin bisa menjadi narasumber dan lain sebagainya. Kalau kita tidak di Komisi I kan mungkin tidak tahu ini. Itu dari saya pak, sekali lagi saya mengapresiasi keberhasilan di ZEE ini antara RI dan Filipina. Kurang lebihnya mohon maaf.

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Walaikumsallam Wr Wb.

Kami persilakan Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN (TNI) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Terima kasih pimpinan.

Terima kasih atas presentasinya walaupun saya tidak mendengar semua. Artinya dengan penetapan batas ZEE ini. Ini kan secara umum berarti memberikan kepastian, kepastian wilayah ZEE kita. Berarti di sana juga kita akan memetik keuntungan, baik dari aspek pertahanan dan keamanan maupun aspek ekonomi.

Nah oleh karena itu saya berharap setelah nanti ini kita tanda tangani bersama dengan Filipina maka tinggal bagaimana pemerintah. Kan DPR itu cuman mengesahkan legislasinya setelah ditetapkan, nah sekarang bagaimana pemerintah memanfaatkan ini, bagaimana sumber daya ekonomi tadi, misalnya tentang potensi ikan tunanya. Apakah kita cuman seperti itu saja, kita biarkan, kita tahu sumber ikan tunanya seperti itu tetapi cuman kemudian kita tidak memanfaatkan ini.

Jadi kita berharap dari Komisi I setelah ini ditetapkan maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah. Baik dikaitkan dengan masalah pertahanan keamanan maupun masalah-masalah dilanjut di bidang ekonomi. Bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam laut yang ada di situ untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kita.

Kemudian juga bagaimana merancang kaitan dengan patroli-patroli keamanan laut untuk menjamin bahwa di situ tidak akan ada lagi terjadi yang namanya illegal fishing. Maupun illegal-

illegal yang lainnya. Ini juga memberikan jaminan kepada bagaimana kita nanti menghadapi yang namanya perilaku kelompok Abu Sayyaf

Jadi umumnya Abu Sayyaf itu menculik itu di perairan selatan yang berbatasan dengan kita, baru dibawa lari ke Zulu. Jadi dia menculiknya tidak di Zulu, di Selatan. Saya lupa pulau yang paling kecil dari Filipina apa ya? Tawi-Tawi ya. Ya makanya dia selalu di Tawi-Tawi itu mencurinya itu ya. Nah di Tawi-Tawi itu tidak pernah dia menculiknya itu di Zulu tidak pernah. Waktu kemarin saya ikut melakukan pembebasan sandera itu di situ. Dan bahkan sandera Indonesia itu sebetulnya salah tangkap begitu ya, mereka yang culik itu sebenarnya Malaysia. Nah artinya apa? Ini bagaimana upaya keamanan di perbatasan ini untuk menjamin tidak ada penyelundupan di sana, tidak ada wilayah itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan kelompok yang ada di Filipina Selatan kan begitu. Ini penting sekali menurut saya, kalau-kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, saya kira ini ya tinggal konsep saja kita punya batas ZEE di situ, kan begitu. Jadi ini segera untuk melakukan pemerintah melakukan satu upaya-upaya dalam rangka pemanfaatan dengan penentuan batas ZEE ini. Ini yang paling penting menurut saya ya. Kita cuman melegalisasi saja ya, tanda tangan selesai, nah apa selanjutnya.

Terus kemudian juga tentang gelar, ya bagaimana membangun postur di wilayah ZEE ini kan begitu. Jadi kalau kita bicara postur berarti di situ ada berapa kekuatan, berapa kemampuan berapa gelarnya yang harus kita tempatkan di sana sehingga menjamin bahwa daerah itu benar-benar milik kita, kita butuh berdaulat. Karena sampai hari ini saya kira pencurian-pencurian ikan kita cukup luar biasa di daerah timur karena kurangnya pengawasan dan itikad baik dari KKP maupun dari TNI AL.

Oleh karena itu semua unsur yang tergabung dalam kepentingan di laut. Apakah itu ada Bakamla, ada KKP, ada TNI AL, ini saya kira ini perlu bersinergi untuk membangun sebuah kemampuan disana kekuatan dalam rangka pengamanan wilayah itu untuk kepentingan kesejahteraan kita, itu yang paling penting saya kira, mempertahankan kesejahteraan itu.

Saya kira itu pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik terima kasih.

Kalau tidak ada lagi barangkali kita secara bergiliran saja untuk menyampaikan atau menjelaskan. Saya menambahkan sekalian ikut bertanya Pak Supiadin mungkin ke yang mewakili Dirjen Perikanan Tangkap. Kalau nanti sudah diratifikasi itu kan di sana betapa saya sebut mungkin crowded ya? Sehingga perlu sosialisasi dari keputusan bersama ini, tapal batas ini atau titik batas ini. Upaya apa yang akan dilakukan oleh kementerian bapak itu dalam rangka sosialisasi ini? Ke mana saja agar efektif efisien diketahui oleh setiap mereka yang masuk ke wilayah zee itu?

Saya kira itu mungkin kami tambahkan.

Baik kami persilakan.

DIRJEN HPI KEMLU (FERRY ADAMHAR.,SH.,LL.M) :

Terima kasih bapak pimpinan.

Mungkin saya akan menjawab secara general dulu pak, nanti teman dari K/L nanti akan menjawab lebih.

Pak ketua dan bapak-bapak yang kami hormati.

Tim perundingan perbatasan ini memang sudah lama dan solid pak yang di dalamnya kita terdiri dari 18 K/L pak, termasuk dari angkatan. Jadi setiap perundingan setiap ini kita selalu

membahas yang namanya posisi DELRI. Jadi dibahas dari seluruh aspeknya pak. Baik dari sisi keamanan sosiopolitik, sosial lainnya, baru kita beranjak kepada *how to negotiate* untuk ini.

Ini kita lakukan dengan negara perbatasan kita, yang kita masukkan ke dalam yang kita namakan *road map*-nya pak. Jadi tim kecil ini, di tim kecil ini kami pun juga punya namanya penasihat pak, tadi ada datang pak Prof Hasin Jalal, ada Prof Hikmah Hanto, lalu Bapak Doktor Hassan Wirayuda dan juga Prof Edy Agus, yang mereka mempunyai disiplin hukum yang berbeda dan juga pengalaman dan ini yang kita dapatkan, yang kita ingin memberi masukan nasihat kepada kita dalam berunding nanti.

Bapak ibu sekalian.

Dalam perundingan ini pak, aspek yang mungkin kita akan tanggapan adalah aspek internasionalnya. Yaitu pertama kita akan setelah kita misalnya disetujui oleh DPR untuk ratifikasi, pertukaran piagam, kita mendaftarkan bersama-sama ke PBB, bapak ibu sekalian. Jadi jelas dengan ini bukan hanya *you can not bully us, you can bully us but you can not bully everyone*. Karena sudah didaftarkan ke PBB bersama-sama pak. Ini mungkin yang kami bisa tambahkan nanti. Bapak-bapak yang lainnya akan menambahkannya.

Nah hal-hal yang kami lakukan, yang akan kita lakukan pak, seperti juga kita lakukan sekarang dengan Singapura setelah kita meratifikasi. Kalau dari sini pak, dari data kami pembahasan dengan teman-teman di K/L adalah pertama kita akan menyelesaikan WTP pak, pengolahan perikanan pak. Karena ini sudah lebih certain lebih tahu ininya dan dengan ini nanti mungkin bapak bisa menjelaskan lebih lanjut. Lalu penyesuaian peta laut di wilayah itu sendiri. Tim ini dengan timnya Filipina sudah mulai berunding pak untuk penyesuaian untuk batas lautnya. Lalu yang ketiga adalah pemutakhiran data-data geospesial dan garis batas ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk itu juga nanti tentara Negara Indonesia yang kami libatkan di sini juga memang akan membuat rancangan operasional. Memang akan ada implikasinya pak ketua. Bukan hanya *deployment* kita melihat secara strategis, masalah keamanannya di sini. Saya setuju sekali dengan Pak Min di sini tetapi juga *deployment* untuk kesejahteraan rakyatnya.

Tadi bapak dari DKP telah menyebutkan beberapa sudah ada beberapa pelabuhan dengan adanya ini lebih jelas dan lebih terukur pak. Dan ini kan kita bicara mengenai catching fish pak. Yang ini nanti akan dibahas ke dunia internasional yang sekarang dilakukan oleh IU, mengenai original dari fish itu sendiri yang kita sangat mendukung karena ini menyangkut juga bagaimana kita membahas dan IU ini. Itu pandangan umum kami pak.

Bu Nur Assegaf, memang kami akan sangat penting ini juga diangkat bu. Karena kami juga ingat ibu, pada waktu kami menyelesaikan perundingan ini pak. Kondisi waktu itu adalah lagi tensi sedang naik antara China dengan Philipina di Laut Cina Selatan.

Nah Seluruh ekspatriat Filipina di dunia menyampaikan persetujuan ini diangkat ke atas. Kita sudah menyelesaikan dengan negara besar, tetangga kita. Kenapa negara besar tetangga yang lainnya tidak mau mengikuti, secara damai, secara amicable, di Soho *our different, our dispute by peaceful mind*. Ini memang sangat kritikal bu bahwa kita negara ASEAN bisa menyelesaikan dengan ini. 20 tahun karena pak, ada beberapa *in between* yang Philipina harus mengubah konstitusinya pak, dalam rangka mereka meng *up date*, meng-*adopt* persetujuan kita ini pak.

Iya agak tertunda sedikit di situ dan yang kedua bapak ibu sekalian, ini dari sudut teknis yang juga mungkin kalau boleh kami menyampaikan di sini pak ketua adalah. Kita adalah 2 negara yang kita namakan 2 negara kepulauan. Yang kita menarik garisnya itu sama, beda dengan negara-negara tetangga lainnya. Kita dengan Filipina adalah dua negara kepulauan kita terikat kepada rezim yang sama. Dan sekarang lagi pending dan sekarang tim kami ada di mana di di Yogyakarta berunding dengan Vietnam untuk masalah EEC pak kepala. Karena mereka menginginkan suatu garis IIC dengan landas kontinen padahal ini dua rezim yang beda, Filipina mau untuk melakukan ini. Segera setelah selesai kita berunding menandatangani ini. Bapak Menteri Luar Negeri waktu itu Pak Martin Natalegawa menandatangani suatu great minutes dengan menteri luar negerinya di Bandung bahwa kita *committed* untuk menyelesaikan landas kontinen dengan Filipina. Jadi komitmen dan *political will* memang sangat besar di antara dua negara dan sangat penting bagi negara kepulauan dari sistem unclosed ini pak. Dengan ini we

can sign not only for the our neighbouring country tetapi juga di-sent kepada dunia luar terutama di bidang hukum internasional. *We can sit together and we can discuss our the limitation processis peaceful mind.* Ini Ibu Nur Assegaf yang mungkin kami mengucapkan terima kasih sekali untuk ini, untuk ini juga bisa diangkat misalnya untuk di parlemen nanti. Ini salah satu contoh yang kita inikan.

Pak Supiadin terima kasih banyak pak, *as always you reach very important issue* pak. Memang ini *step* pertama bagi kita. Tidak terbayang dahulu kita tidak punya ada kesepakatan yang lebih jelas dan Filipina menanggapi isu itu pak. Jadi kedua pemerintahan juga sudah melihat ini yang kita namakan *political will* pak. *Next we have a very certain condition* pak untuk kedua. Karena kalau kita sudah menyelesaikan berdua pak, kita berdua yang akan menyelesaikan pak. Mungkin di ... *three junction* kita akan menyelesaikan dengan negara tetangga kita lainnya. Pasti bapak dari TNI AL akan menambahkan betapa ini penting dalam pengertian ada itung-itungannya dari militernya untuk mengenai *deployment* dan juga postur keamanan laut kita secara menyeluruh.

Rest for sure pak, ini tidak akan ratifikasi terus diam tidak pak. Ini akan terus kita lanjutkan seperti yang saya sampaikan WPP. Nanti bapak-bapak akan menyampaikan lagi dan apa yang kita lakukan. Karena saya juga yakin setelah ini para investor akan datang, *these part of land, these part of island*, jadi itu *belong to* Indonesia now. Di mana bentuk kerja samanya, bentuk ininya yang nanti akan di-*elaborate* oleh bapak.

Demikian pandangan kami pak, kami mempersilakan wakil dari ini menjelaskan WPP dan *what next you can do in these from this agreement* pak.

Terima kasih pak.

DIR PENGELOLA SUMBER DAYA IKAN KKP :

Izin pak pimpinan.

Tentunya dengan akan ditetapkannya garis batas ini, kami akan segera mensosialisasikan kepada stake holder atau pihak-pihak terkait yang berkepentingan di dalam memanfaatkan perairan di WPP 716.

Bapak pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati.

Pada tahun 2017 ini, ini kami punya kebijakan untuk segera mengoperasikan 11 WPP yang ada di wilayah NKRI ini dan salah satunya adalah di WPP itu 716 yang sedang kita bahas mengenai kelembagaan pengelola WPP NRI. Dan yang tentunya dengan adanya ketentuan yang baru ini, kami akan segera memanfaatkan pihak terkait di WPP NRI ini seperti perguruan tinggi yang ada yang kita sebut dengan *learning center*-nya. Kemudian dinas provinsi terkait yang berada di sekitar wilayah WPP NRI seperti Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Morotai untuk bersama-sama membahas lebih lanjut mengenai potensi yang ada di wilayah WPP NRI ini.

Dan terkait dengan itu tentunya kami juga akan bersama dengan Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan akan mengevaluasi kembali apakah dengan adanya garis batas ini yang baru ini potensi yang ada di sana meningkat atau sebaliknya. Tentunya harapan kami akan semakin meningkat.

Kemudian perlu kami sampaikan juga bapak pimpinan bahwa dengan adanya ketentuan baru ini tentunya program-program kami di dalam pengembangan sentra kelautan di pulau-pulau terluar akan semakin kita perkuat lagi. Pembangunan fasilitas-fasilitas pelabuhan untuk membantu kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan skala kecil, tentunya akan kita perbaiki terus, kita tingkatkan kualitasnya.

Sebagaimana tadi kami laporkan yang banyak tertangkap dari Filipina adalah kapal-kapal ukuran kecil 1 sampai 2 gross ton, artinya di sini potensi untuk mengembangkan nelayan-nelayan kecil sebetulnya masih terbuka luas. Sehingga Kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh mereka yang tadinya dimanfaatkan oleh mereka. Maksud saya tentunya harus dimanfaatkan oleh

nelayan-nelayan kecil kita dengan memberikan bantuan kapal-kapal ukuran sekitar 3 gross ton atau dibawah 10 gross ton hingga mungkin pemanfaatan sumber daya ikan di perairan laut lepas begitu.

Saya kira demikian sementara bapak pimpinan yang bisa sampaikan.

F-NASDEM (MAYJEN (TNI) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :

Terima kasih pak dari KKP.

Saya memang ada atensi khusus di KKP, Kebijakan Presiden, bagaimana untuk mengeksploitasi sumber daya maritim kita. Nah yang saya menjadi atensi tadi bapak katakan ini bagaimana dengan pengesahan ZEE ini kan ZEE ini bukan wilayah kedaulatan tapi kita memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya di situ. Tapi dia bukan wilayah kedaulatan negara jadi itu harus sama kita pikiran kita. Ini kami sudah manggil Prof Jalal segala macam itu sudah Ibu Etty.

Nah oleh karena itu yang saya memberi atensi tadi pemberdayaan nelayan kecil kita. Contoh saya dari dapil Jawa Barat itu di Garut Selatan ada yang namanya Rancabuaya Pamempeuk. Itu Saya usulkan tadinya kepada Menteri KKP untuk dibangun dermaga tetapi dermaga ini untuk nelayan kecil. Kenapa kalau nanti dibangun dermaga besar, ini nanti termasuk di ZEE ini pak di Filipina, di Sulawesi Utara dan segala macam Morotai. Karena kalau nanti dibangun dermaga besar, siapa yang bersandar di situ? Bukan nelayan, bukan nelayan yang tradisional itu tetapi justru nelayan-nelayan berdasi. Artinya nelayan kecil kita tidak menikmati itu yang dia modalnya terbatas, kapalnya terbatas ukurannya sehingga kemampuan dia juga mencari ikan ke laut lepas terbatas. Apalagi dia tidak dilengkapi dengan Navigasi itu yang sering membuat nelayan kita nyasar itu pak. Karena dia tahunya kalau nelayan kan tahunya di mana banyak ikan dia enggak lihat perbatasan, tahunya di mana banyak ikan dia datang ke situ, tiba-tiba sudah melanggar.

Jadi ini atensi saya ini bagaimana pemberdayaan sehingga nelayan kita yang tradisional itu dia merasa manfaatnya, kalau perlu pak tolong ditingkatkan ini mereka menjadi kapal-kapal yang ya relatif semi modernlah untuk membantu mereka. Ya supaya ekonomi mereka tumbuh. Karena kalau tidak kembali lagi yang menikmati nelayan berdasi bukan nelayan kita yang itu tadi yang kecil-kecil itu.

Ini pengalaman saya di Rancabuaya dibangun ya seperti itu. Saya bilang kalau ini dibangun siapa yang untung. Karena nelayan kami di Rancabuaya itu bukan hanya sedikit pak sedikit saja pasirnya itu tempat nelayan untuk sandar yang lainnya itu batu karang. Ya di Rancabuaya itu. Itu saya minta juga perhatian juga pak.

Jadi itu etansi saja pak kepada nelayan-nelayan ini dibantulah untuk modernisasi kapal kapalnya. Ya entah alat navigasinya sehingga mereka tidak nyasar ke mana-mana begitu mudah dipantau.

Kemudian kaitan dengan kepentingan pertahanan negara pak. Tolong juga nelayan-nelayan kita ini ya dibantu nanti Angkatan Laut. Kemanapun mereka berlayar jangan lupa bendera merah putih itu selalu berkibar di kapalnya. Sehingga kalau ada apa-apa kita cepat tahu oh ini bendera Indonesia. Ini penting dalam rangka kita juga mengamankan, mereka itu terdepan ada apa-apa terdepan, ada bencana alam, ada bencana apa kecelakaan. Kadang-kadang mereka lebih tahu dari pada kita.

Oleh karena itu mereka perlu di dibekali dengan navigasi plus bendera-bendera merah putih tadi pak. Saya kira itu pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik terima kasih.

Mungkin dilanjutkan.

DEPUTI IV PERTAHANAN POLHUKAM (LAKSDA TNI DR.H.SIPAHUTAR) :

Terima kasih.

**Yang terhormat Pimpinan sidang.
Hadirin sekalian yang dimuliakan.**

Izin kami menambahkan dari apa yang disampaikan oleh tim kami bahwa untuk keamanan bahwa kita sudah memegang *border agreement* pada tahun 1975, yaitu mengenai kesepakatan kedua negara secara rutin untuk melaksanakan patroli terkoordinasi. Kemudian receive Tahun 1975 *crossing agreement*, yaitu tentang *crossing pass card* bagi penduduk sekitar wilayah perbatasan. Kemudian perkembangan kerja sama Trilateral Indonesia Malaysia dan Filipina khususnya pengamanan perairan Sulu Mindanao Sulawesi.

Jadi mohon izin pak kami sampaikan di peta bahwa perkembangan yang ada sekarang, di perairan Zulo dan Tawi-tawi di sinilah tadi yang disampaikan sering terjadi aksi-aksi perompakan yang bersifat teror maupun sampai dengan kehilangan nyawa. Bahwa pada tahun 2016, pada tanggal 5 Mei di Yogyakarta, bahwa kita telah menyepakati SOP pak, standar operasi prosedur yaitu kerja sama pengamanan perairan Zulu Mindanao dan Sulawesi.

Tadi sudah disampaikan oleh Kapus Hidros bahwa di sini pak, di sekitar sini kita sudah menyusun sektor untuk keamanan bersama. Sektor keamanan bersama, bagaimana lalu lintas di area ini khususnya kapal-kapal niaga pak. Di sinilah yang sering terjadi dan ini telah disepakati oleh pihak Indonesia dan Malaysia dan ada 1 negara yang belum menyepakati adalah Filipina. Bahwa perkembangan kerja sama tentang patroli maritime, bantuan darurat pertukaran informasi intelijen dan jalur komunikasi.

Jadi konkritnya pak, kapal Indonesia akan melintas di perairan yang rawan pada point vokal area ini, itu berkomunikasi dengan Filipina dan Angkatan Laut Malaysia. Ketika kita akan melintas masuk ke sana. Setelah dapat jawaban dari salah satu negara akan mengawal, baru itu akan melintas. Jadi dari segi ekonomi bahwa keamanan kapal niaga itu dijamin pak. Sampai sekarang ini mungkin belum terdengar kembali masalah perompakan.

Juga demikian sebaliknya dari kapal Filipina atau kapal negara mana saja yang melintas pada jalur itu diinformasikan oleh negara Filipina atau Malaysia kemudian diterima di Indonesia pak. Sekarang ada permasalahan pak, kami sampaikan pak, bahwa posisi perairan Tawi-tawi, Zulu dan Sulu ini pak ini cukup-cukup jauh dari posisi Sebatik pak. Sebatik ini adalah kapal-kapal Indonesia yang menjaga kelautan wilayah Indonesia di Ambalat.

Nah ini yang kami kirim adalah kapal-kapal patroli ke sana. Jadi ini ada sedikit keterlambatan tapi inilah unsur yang paling cepat dari aparat untuk mengantisipasi kegiatan di sana. Jadi kalau tadi ada segi keamanan, kami mohon izin bapak bahwa tadi mohon dikembangkan pelabuhan-pelabuhan di area ini di sepanjang utara pantai Sulawesi. Kami sangat mendukung pak, sangat mendukung sekali. Kalau ada untuk dermaga kapal nelayan tradisional kami juga sangat mendukung, ada kapal untuk dermaga untuk kapal besar, kami juga mendukung pak. Yang kecil nanti untuk kapal patroli kami. Kami siap memberikan pembinaan kepada para nelayan, mendukung perikanan. Kemudian untuk kapal besar juga kami pun juga sanggup untuk menjaga keamanan di sana pak. Ada keuntungan yang sangat Signifikan pak, jika ini dibangun di utara sini pak, kami sangat dekat untuk melaksanakan patrol pak. Jadi sekarang ini pak kapal-kapal yang patroli di utara di perbatasan ini pak ini digerakan dari Tarakan, dari sebatik jadi terlebih jauh. Seandainya digerakan dari pantai di utara Sulawesi ini sangat mudah ataupun dari Manado sekarang. Dari Manado sudah digerakan ke utara pak. Kami masih ada keterlambatan pak. Jadi mungkin perkembangan ini, kami sangat mendukung ratifikasi ini.

Kemudian pak untuk kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan penyempurnaan di Mabes TNI nanti pak pada tahun 2017 ini, penyempurnaan SOP untuk kesepakatan 3 negara ini untuk dilaksanakan. Kemudian kami izin mungkin ditambahkan dari staf kami untuk masalah hukum.

Terima kasih pak.

KADISKUM TNI AL :

Saya dari Dinas Hukum pak TNI AL, KADISKUM. Tentunya apa yang diutarakan terhadap RUU untuk perbatasan ZEE kita ini. Ini adalah sangat positif sekali pak, jadi memang harus kita realisasikan. Ya dampak positifnya memang banyak sekali dan hal ini sebenarnya sejak ada persetujuan atau kesepakatan perbatasan antara Filipina-RI ini, kedua belah pihak sudah sepakat untuk menerapkan menurut ketentuan nasionalnya masing-masing. Jadi kita memang harus merealisasikan Undang-Undang ini tujuannya untuk meratifikasi mengesahkan.

Jadi apa yang sudah disampaikan oleh bapak Wasop Kasal tentang patroli itu sangat signifikan sekali dengan TNI AL sebagai penyidik pak. Jadi penyidik tindak pidana tertentu di laut sehingga kita juga akan mempunyai kepastian posisi untuk *law enforcement*-nya. Jadi untuk penegakan hukumnya sehingga tidak terjadi suatu hal yang sering dipertentangkan antara beberapa negara perbatasan. Memang perbatasan itu adalah bisa merupakan awal konflik dari suatu negara. Ya konflik itu macem-macam, konflik ekonomi, pertahanan keamanan ya konflik kepentingan. Ini memang harus direalisasikan.

Begitu juga tadi memang faktor ekonomi, itu sudah kita ketahui pak diundang-undang ZEE kita bahwa hak berdaulat kita untuk mengeksplorasi eksploitasi sumberdaya alam hayati non hayati, itu memang kita miliki, kita memang mempunyai hak termasuk perikanan. Perikanan ini masih sebagian saja. Termasuk survey bahkan pendirian istana ... boleh pak kita pak. Tentunya kita pernah dengan Singapura untuk less ... ini pernah saling mengklaim. Itu batas saya, ini batas saya. Ya karena memang belum ada batasan yang disepakati oleh kedua negara. Nah ini yang bikin daerah itu menjadi abu-abu, ya menjadi sumber konflik tentunya.

Jadi kalau pengesahan atau ratifikasi Undang-Undang ini direalisasikan, saya kira pasti banyak keuntungannya yang akan kita raih, untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik tambahkan lain silakan.

KEAMANAN PERBATASAN (KOLONEL YANWAR) :

Terima kasih bapak pimpinan sidang.

Dari kami Sebagai Direktur Pengamanan Kerjasama Perbatasan Pushidrosal. Kami melihat bahwasannya ratifikasi daripada perjanjian ini atau kesepakatan perbatasan ini amat sangat *crucial*. Terutama selain daripada tinjauan aspek konstitusional sebagai kewajiban dari kedua pihak. Akan tetapi ini juga akan dapat menciptakan kepastian hukum serta ketegasan dalam konteks penegakan kedaulatan maupun penyelenggaraan kewajiban-kewajiban negara dalam konteks menjamin keamanan bernavigasi maupun keamanan maritim.

Di sisi lain dari aspek pemetaan ini juga akan lebih dapat memberikan peluang-peluang di dalam pengembangan serta upaya-upaya perencanaan pengelolaan sumber daya alam di dalamnya.

Terima kasih bapak.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Ini mau melanjutkan dahulu, melanjutkan dari. Ya nanti setelah ini ya.

DIRJEN PUU KEMKUMHAM :

Terima kasih bapak pimpinan.

Tadi ada sedikit, sebelumnya terima kasih tadi atas dukungan bahwa memang ini kita yakin bahwa kita perlu untuk segera diratifikasi. Tadi masih ada sedikit keraguan apakah posisinya ini sudah *fix* agar jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan posisi.

Jadi mohon kami menyampaikan bahwa perundingan selama 20 tahun itu dibagi dalam sesi perundingan untuk menyepakati 5 segmen. Dan setiap segmen itu sudah disepakati. Jadi titik-titik ini sudah merupakan kesepakatan antara Filipina dan kita. Jadi sudah tidak ada lagi keragu-raguan. Oleh karena itu, ini tinggal di kita mengesahkan secara hukum. Agar apa? Mempermudah karena ini menjadi landasan bekerja untuk bidang-bidang yang lain. Termasuk di dalamnya adalah kami di push hidros itu dengan adanya itu kita akan memetakan secara pasti. Selama ini sudah kita petakan tetapi masih dari belum resmi sebenarnya.

Nah dengan adanya ini maka ini peta ini akan resmi dan akan tergambar di peta Indonesia yang akan berlaku di seluruh dunia pak. Karena peta yang diterbitkan oleh push hidros adalah satu-satunya peta Indonesia yang sah yang diakui oleh IHO.

Jadi seluruh pengguna laut dunia ini hanya akan menggunakan peta terbitan dari push hidros. Ini sangat penting kemudian yang kedua juga dengan adanya peta yang pasti tentunya nanti kerjasama-kerjasama ekonomi sudah ada kepastian untuk sampai optimal sampai dengan ke batas ZEE.

Selama ini mungkin kalau ada kerjasama-kerjasama yang dekat-deket ZEE masih agak ragu-ragu karena masih dianggap masih kemungkinan ada konflik tapi dengan sudah adanya kesepakatan kedua negara ini maka kita bisa optimalkan. Termasuk yang aparat keamanan ini juga demikian dia akan operasi itu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk pada saat kita claim unilateral bisa jadi Filipina akan mengklaim bahwa itu sudah masuk. Tetapi dengan ini maka tidak akan terjadi lagi itu.

Demikian juga kalau seandainya tadi yang masalah patroli terkoordinasi untuk 3 negara yang sudah disepakati. Nah ini permasalahannya sebenarnya masih sekarang ada antara Filipina dengan Malaysia tapi kalau dengan kita dan Filipina, insya Allah sudah selesai. Demikian juga dengan Malaysia dengan kita ini sudah selesai. Sehingga kita sudah lebih optimal, yakin apabila ada kejadian di wilayah kita, kita akan bisa melaksanakan operasi secara optimal sampai dengan batas wilayah terluar.

Mungkin ini sebagai tambahan, terima kasih.

F-PAN (IR.ALIMIN ABDULLAH) :

Pimpinan bisa menambahkan sedikit pimpinan?

Jadi begini kalau saya lihat ini kan 8 titik pak ya? Apakah dengan Filipina ini memang hanya 8 titik saja pak? Karena ketika dengan Singapura kemarin itu ada sebagian sudah tetapi masih ada sebagian yang belum kita rundingkan.

Jadi masih ada daerah yang belum kita. Apakah dengan Filipina ini sudah final semua ini atau masih ada lagi yang masih batas apakah sebelah sini nomor 1 dan sebelah sana nomor 8? Yang masih memang masih belum putus, sebab saya lihat waktu dengan Singapura itu ternyata waktu kita sudah ratifikasi ada bagian masih terbuka, karena belum selesai, belum final. Mudah-mudahan kalau dengan Filipina ini betul-betul sudah tidak ada lagi yang harus kita bicarakan atau yang kita ambil kesepakatan.

Jadi selesailah perbatasan dengan tetangga kita Filipina tetapi kalau dengan Singapura yang saya ingat itu masih ada yang daerah yang belum, belum kita jamah untuk kita sepakati. Saya ingin dapat kepastian ini di Filipina apakah sudah final atau masih ada lagi juga yang terbuka?

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik terima kasih.

Kami lanjutkan Pak Andreas.

F-PDIP (DR.ANDREAS HUGO PARAIRA):

Terima kasih pimpinan.

Pertanyaan informatif saja pak. Tadi dari penjelasan dari bapak-bapak TNI AL berkaitan dengan perbatasan atau rencana kita untuk meratifikasi wilayah batas wilayah laut dengan Filipina ini. Apakah di bagian luar dari pulau Sulawesi di daerah ini, apakah kita punya pos pengamanan laut yang cukup signifikan untuk ya menindaklanjuti pengamanan wilayah perbatasan ini? Kalau ada di daerah mana saja pak kita punya?

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik kami persilakan.

DEPUTI IV PERTAHANAN POLHUKAM (LAKSDA TNI DR.H.SIPAHUTAR) :

Izin menjawab pak.

Di utara sini pak, ada Posal dari pertama pak ya, ini adalah Lantama 9. Jadi wilayah Menado pak mencakup area seperti ini pak, untuk menangani masalah area ini pak, di sini ada Lanal Ternate, ada Lanal Morotai, kemudian ada Lanal Tahuna, Lanal Maruwa. Kemudian pulau-pulau ini dilengkapi dengan posal-posal pak dengan pangkat paling rendah kapten pak. Dan di sini juga pun ada beberapa pos dari pos perikanan yang dibangun secara terpadu. Jadi ada Angkatan Darat, ada Polisi, ada Angkatan Laut pak. Karena masalah di sini pelanggaran. Bisa juga terjadi garwil udara, garwil laut pak, pelanggaran wilayah maupun pelanggaran perikanan pak.

Jadi kita ada pak, jadi laporan setiap kegiatan *illegal fishing* di daerah ini lalu termonitor selama 24 jam pak. Jadi kami menerima laporan setiap pagi terjadi pelanggaran di sana pak. Radar belum pak, jadi radar ini menjadi keterbatasan kami pak. Ini yang kami sampaikan bapak, jadi radar bantuan dari Amerika ini belum maksimal pak. Jadi kalau memang ada bantuan radar dari yang lebih baik itu kami sangat mendukung. Karena ini informasi dari KRI pak, radar itu dari KRI semua, KRI yang memiliki radar.

Mungkin bisa ditambahkan dari.

POLHUKAM :

Mungkin untuk menambahkan tadi mengenai berapa persen pak, sebenarnya belum 100%, 95% tetapi karena itu adalah yang sisanya kita berkaitan dengan negara lain.

F-PAN (IR.ALIMIN ABDULLAH) :

Kalau boleh sebelah mana itu pak?

POLHUKAM :

Jadi ini seperti di sini masih ada sebagian, karena di sini masih ada titik yang perundingan harus melibatkan Malaysia jadi di sini 5% pak sehingga kita sudah 95%, ini sudah selesai 95%. Tinggal kita untuk melaksanakan di sini harus dengan Malaysia untuk menemukan 1 titik. 1 titik ini selesai maka tinggal narik garis. Kemudian di sebelah sini juga ada Palao, nah kalau Palao selesai maka selesai. Kita tidak bisa melaksanakan perundingan di sini hanya dengan Palao sendiri, tetapi harus Indonesia, Palao dan Filipina sebaliknya juga demikian seperti halnya juga dengan yang di Singapura pak. Yang di Singapura demikian *three junction point* yang di wilayah di sisi timur itu juga dengan Malaysia. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan sehingga tetap kita ratifikasi alhamdulillah sudah selesai dengan Singapura tetapi masih ada sisa pekerjaan yang kaitannya dengan Malaysia, demikian juga dengan yang di sini.

Jadi saya kira ini tidak terlalu berpengaruh untuk kita dengan Filipina karena sisanya tinggal sedikit. Yang kita permasalahan berarti yang di sini sudah selesai sudah final ini ada 5 segmen, segmen 1, 2,3,4,5 ini sudah selesai yang harus segera diratifikasi. Karena ini proses untuk membentuk ini sudah 3 tahun pak. Jadi mulai 2014 sampai sekarang karena sudah final dengan Filipina 2014, ini sudah final. Karena kita sudah sah dan dengan Filipina sudah mulai beranjak untuk membuat peta bersama. Karena kenapa harus membuat peta bersama? Agar dalam penggambaran nanti tidak terjadi mereka mengambarkan keliru sehingga harus bareng-bareng. Jadi saya kira demikian sebagai tambahan.

Terima kasih.

F-PAN (IR.ALIMIN ABDULLAH) :

Pak ketua, jadi pak ini kita juga sama-sama memahami bahwa kita sebelumnya belum tuntas sebab 5% itu batas negara kita pak. Dan bisa menimbulkan masalah karena belum selesai, apalagi itu dengan 3 negara. Kalau yang lainnya yang kita sahkan dengan dua negara dan dua negara ini kan kita selama ini bermasalah makanya kita yang selesaikan segera.

Jadi saya kira kita masih punya hutang ini untuk daerah itu karena ya kita sudah sekian puluh tahun merdeka ternyata banyak perbatasan-perbatasan kita memang belum selesai. Dan ini merupakan bisa menjadi bahaya dan mengancam kita punya kekayaan negara dan segala macam. Jadi kita tidak bisa hanya 5% tetapi justru pintu masuk mengenai itu memang belum ada kejelasan. Kan dengan Filipina ini karena belum ada kejelasan ini jadi dimanfaatkan orang ini pak. Nah yang 5% ini juga bisa menjadi pintu masuk kalau kita juga tidak pikirkan segera. Karena saya lihat persepakatan-persepakatan seperti itu, perjanjian seperti ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Jadi walaupun dia 5%, saya tidak yakin itu sedikit dan cukup 1 tahun 2 tahun tidak ada itu. Karena prinsipnya apabila ada sesuatu memperjuangkan bagian kita masing, kepentingan kita masing-masing. Jadi saya kira kita tetap yang di Komisi I DPR RI dalam benak kita, kita masih punya banyak wilayah yang belum memang belum selesai.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Pimpinan Pak Andreas.

F-PDIP (DR.ANDREAS HUGO PARAIRA):

Terima kasih tadi dari penjelasan bapak-bapak TNI AL.

Ya saya kira upaya untuk memastikan garis batas antara Indonesia dengan Filipina ini satu hal yang sangat positif tetapi mendengar penjelasan tadi, meskipun kita sudah mempunyai pos-pos di wilayah-wilayah yang strategis tetapi perlu juga membuat catatan dari kita, artinya dari pihak Indonesia kita perlu memaksimalkan pengamanan wilayah ini dengan di samping sudah ada pos-pos tadi, juga dukungan peralatan teknologi yang lebih baik, lebih canggih sehingga pengamanan itu juga maksimal untuk wilayah tersebut. Sehingga dengan demikian dari kesepakatan ini kita juga memperoleh hasil yang maksimal dari perjanjian yang sudah dengan susah payah kita lakukan dengan pihak Filipina. Saya kira itu perlu menjadi catatan kita, untuk juga ya memberikan dukungan pada pihak keamanan laut untuk melakukan pengamanan secara maksimal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik mungkin ditambahkan.

Sebelum dijawab, ini ada 1 pertanyaan terakhir.

F-GERINDRA (ASRIL HAMZAH TANJUNG.,SIP) :

Terima kasih pimpinan.

Ini mungkin Pak Fery yang jawab ini atau Pak Yanuar Angkatan Laut atau mungkin Pak Sipahutar. Undang-Undang ini antara lain juga ada gunanya nanti untuk menjamin status penduduk, nah mungkin kita lupa. Menjamin status penduduk di samping juga bagaimana nelayan lokal untuk mengelola sumber daya. Setahun yang lalu saya ikut Pak Wapres, Pak Yusuf Kalla ke Filipina dalam rangka APEC, saya koordinasi dengan dubes Pak Jhonny Lumindong kalau tidak salah. Masih ada penduduk sana, asli Indonesia seperti suku Bajo itu, berkerja di sana bolang lagi bolang lagi dan jumlahnya cukup banyak.

Jadi akhirnya pemerintah kita dengan Filipina waktu itu membuat satu kesimpulan, saya lupa nama sukunya, dia memilih, kau memilih jadi warga negara Filipina atau balik kampung? Mungkin di sekitar-sekitar yang di utara Sulawesi ini apa mungkin, Miangas atau apa itu. Nah saya tidak tahu itu pak, apa sampai sekarang ini sudah selesai? Karena sebagian ada yang ingin pulang kampung.

Jadi bukan hanya untuk mengelola sumber daya alam saja. Ya ini juga tadi saya katakan menjamin status penduduk. Karena dinaikan itu langkah-langkah perbatasan, seperti kita dengan Malaysia, kita dahulu kecolongan Sipadan-Ligitan, penduduknya orang kita tetapi didekati Malaysia, kita kalah, nah saya khawatir seperti itu. Itu dubesnya langsung juga ngomong sama kita itu cukup banyak, mungkin sampai seribu atau berapa itu. Nah tolong dicek nanti Pak Fery mungkin sudah ada datanya, saya tidak tahu. Mungkin dari Polhukam atau dari Keamanan Laut, itu jadi dia sampai sekarang belum tahu. Dahulu ditawarkan, akhirnya ada yang milih ada yang tidak. Karena kebetulan mungkin punya usaha di Filipina seperti suku Bajo suku apa, banyak sering itu masuk. Nah ini mungkin yang terakhir, terima kasih.

Saya kembalikan ke ketua.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik soal penduduk itu, kami pernah berkunjung ke sana, berbicara dengan masyarakat yang di wilayah sebelah selatan General Santos itu. Ketemu di sana, ya agak dilematis memang. Kami tanya, kenapa kok tidak memilih? Pak begini kami tetap merah putih tetapi kalau kami sekarang menerima kewarganegaraan Indonesia pasti akan segera diperlakukan oleh mereka sebagai WNA, WNA-nya Filipina sehingga ya harus pulang. Kemudian bisnis kami di sini, ada bisnis kayu, kemudian ikan dan sebagainya akan diperlakukan seperti WNA.

Lalu kalau seperti ini, kami senang saja, kami masih merah putih, tetapi bahkan pilkada mereka kami dapat kupon pak, sembakolah kira-kira kalau di kita, begitu. Lalu juga dapat tunjangan dan sebagainya, lalu datang ke rumah sakit. Kalau di kita mungkin rumah sakit di tingkat kecamatan itu puskesmas, dia dapat itu hampir 6 ribu. Waktu itu kami masuk ke sana dan kalau soal kekuatan, kami bicara dengan laksamana siapa di sana, memang dia tidak bisa mendikte Angkatan Lautnya ke wilayah selatan karena berurusan di wilayah utaranya saja masih ruwet. Karena Angkatan Laut kami sangat-sangat terbatas menurut mereka. Di sana itu di bawah selatan, Angkatan Daratnya hanya 1 brigade kalau ditulisnya divisi, 1 divisi di bawah pimpinan seorang bintang 1, tetapi kami diajak inspeksi ke barat-baratnya ya divisi kerangka, mungkin tidak lebih dari 1 brigade, masih brigade, mungkin tidak lebih dari 2,5 batalyon saja.

Jadi memang daerah Mindano ke selatan dan sebagainya sampai pulau Panuragan begitu, itu ya sulit tidak dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah setempat. M16 ditawarkan, mereka tahu wah ada parlemen Indonesia, datang ke tempat istirahat kami dan menawarkan senjata itu pistol itu 300 Dollar dan M16 500 Dollar bekas pakai. Saya tanya, anda dapat dari mana? Oh pak saya satpam, kalau masuk satpam, kalau misalnya mau masuk ke bank, ya sudah silakan masuk kerja di bank, mau jadi apa satpam. Anda punya senjata tidak? Punya. Ya sudah jadilah begitu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita semua, ternyata di wilayah selatan terutama

perbatasan dengan kita minim sekali kontrol dari pemerintah Filipina terhadap wilayahnya. Ini situasi seperti ini mungkin menjadi bahan masukan patroli-patroli kita. Jangan harapkan ada patroli yang benar-benar komprehensif yang dilakukan oleh pihak Angkatan Laut mereka. Itu mungkin, kami persilakan pak di akhir.

DIRJEN HPI KEMLU (FERRY ADAMHAR.,SH.,LL.M) :

Kami jawab bapak, kami berikan masukan bapak.

Terima kasih pak.

Saya hanya menambahkan dari Pak Alimin tadi pak, memang setelah kita selesai 2014 berunding dengan Filipina menyelesaikan ini, Filipina *committed* seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan kedua menteri untuk menandatangani, *we are moving forward* untuk menandatangani untuk memulai perundingan dengan landas kontinen kita pak, ini penting pak karena kita dua negara kepulauan. Ini penting bukan hanya dengan Filipina tetapi juga penting untuk negara-negara lainnya pak. Kan ada keinginan untuk mendorong kita pak supaya untuk *single line*. Kita tidak bisa karena rezim hukumnya beda pak, berdasarkan nam clouse landas kontinen dengan ZEE.

Nah Filipina ada kesepakatan di antara kita untuk kita berunding ini. Nah lalu dengan ini dubes mereka di Tokyo pak, adalah tim perunding mereka yang datang kepada kita pak, setelah selesai kita berunding ini pak. Jadi mereka datang, kita berunding, bagaimana *how we start our negotiation* dengan di sini pak dengan Palao pak, ini kita bicara yang 5% ke depan ini pak.

Jadi ini kita sudah mulai, lalu kita pergi tahun 2015 ke Filipina ke Manila, *we are committed* untuk bertiga menyelesaikan ini dengan pihak Palao karena mereka sudah berbicara dengan pihak Palao juga pak secara bilateral. Jadi kita bertiga dengan Palao akan menyelesaikan ini, pending ini semua selesai pak. Berikut juga dengan Malaysia pak. Jadi terima kasih bapak angkat masalah ini dan kita juga memang memanfaatkan momentum itu untuk menyelesaikan simpul-simpul itu pak. Yang memang kita harus lakukan *step other time* pak, *step-step* yang kita lakukan untuk ini.

Kedua mengenai Pak Asril, begitu juga dengan Pak Hasanuddin, kami juga dahulu pernah jadi direktur perlindungan ke sana pak. Tetapi waktu dahulu 15 tahun yang lalu pak ya, belum bisa sophisticated yang bapak bilang itu, memang kita terima kasih dengan pemerintah Filipina yang boleh dibidang mereka juga sangat bisa memanfaatkan keberadaan warga negara kita di sana untuk juga diberdayakan kegiatan-kegiatan yang non politik ya pak ya, seperti keadaan ekonomi dan lainnya. Kami memantau pak, makanya di Konsulat Jenderal kita yang di Davao kita punya atase imigrasi di sana pak, yang mungkin salah satu atasannya adalah untuk ini. Untuk ini pun sebenarnya kami sudah mengundang teman-teman dari Imigrasi, mohon izin bapak mungkin bisa menambahkan pak, *what government next step to do*.

Khusus terima kasih kepada Pak Hasanuddin, pak ketua, mengenai kesimpulan yang bapak bilang, keamanan kita, kita yang beresin dahulu karena yang selatan itu ternyata belum se-ini. Saya terima kasih sekali pak, bapak-bapak dari Petahana tentu akan melihat ini secara lebih serius.

KEMENKOPOLHUKAM :

Terima kasih pak.

Kami dari Kemenkopolkukam akan menambahkan. Jadi desakan garis batas ZEE ini sudah jelas bagi kita dan dari segi pertahanan negara kita akan mempunyai kepastian dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat RI pak. Dan ini juga akan menjamin pembangunan perekonomian di wilayah laut Sulawesi nantinya. Di mana kita ketahui bahwa jalur Alki 2 dari Selat Lombok sampai laut Sulawesi ini, ini merupakan Alki 2. Jadi kapal-kapal besar terutama kapal tanker yang 200.000 ton yang tidak lewat Selat Malaka, semua lewat sini pak. Kita pernah

dahulu melaksanakan penutupan Selat Lombok itu zamannya Pemerintahan Pak Harto pernah kita *test case*, mereka sangat kesulitan dengan tidak ada jalur Alki 2 ini.

Jadi dari segi keamanan betul-betul kita perlu tingkatkan pelaksanaannya. Tadi disampaikan oleh bapak mengenai terutama di perairan Miangas, perbatasan kita dengan Filipina, ini sudah jelas karena disampaikan sekarang itu ada 26.000 warga pisang namanya, Filipina Sanger. Jadi warga pisang ini 26.000 dia *steples* tidak ada kewarganegaraan. Karena menurut Undang-Undang yang berlaku di Filipina, warga Indonesia yang ada di sana itu tidak bisa diberikan KTP Filipina karena dia ada Undang-Undangnya mengatakan hal ini dianggap warga negara Indonesia. Jadi tidak bisa mendapatkan KTP Filipina tetapi mereka sangat membantu, dalam bapak pimpinan tadi sampaikan. Ini sudah melaksanakan peranan satgas untuk penanganan terhadap dorman ini bersama Kemlu dengan Mabes TNI juga. Namun tadi sudah disampaikan beberapa bisa berpulang kepada mereka sendiri. Mereka penghidupannya adalah di sana demikian.

Jadi ada juga yang menjadi nelayan sampai di Bitung, oleh kita diakomodasikan diberikan kartu sementara dari Walikota Bitung. Kemudian di Miangas di Maroro mereka juga banyak sebagaimana yang selama ini memang kadang-kadang ada akses-akses negatif kriminal namun mereka diperlakukan sebagai saudara oleh warga Sangir yang ada di Indonesia. Ini ke depan kita perlu bentuk tim yang lebih intensif lagi karena jangan sampai seperti di Kurdi. Kurdi kan mereka *steples* ada Turki ada Irak. Memang sekarang tidak ada masalah, namun tidak menutup kemungkinan kalau mereka sudah berkembang ke depan mungkin lebih banyak lagi, mereka tanpa warga negara bisa pemicu hal-hal yang negatif di kemudian hari karena mereka ada acara kebangsaan sendiri, warga Sangir ini pak.

Dan tadi sudah disampaikan juga untuk pertahanan keamanan, kita dari Polhukam mengkoordinir peningkatan keamanan di sana. Di samping Angkatan Laut sudah disampaikan tadi pos-pos dan Angkatan Laut mempunyai radar untuk Qeso di Kuandam Gorontalo sampai 300 mill pak. Jadi Angkatan Udara juga memasang patroli. Di samping itu di Manado di Runaway Manado mem-*back up* kapal-kapal yang patroli, kita ada pangkalan udara Angkatan Laut dengan pesawat CN 235 kita melaksanakan patroli rutin sepanjang laut Sulawesi sampai ke Tarakan.

Jadi itu pelaksanaan pengamanan laut Sulawesi ini, karena ini adalah jalur Arki yang paling strategis, kapal-kapal besar lewat sana semua.

F-GERINDRA (ASRIL HAMZAH TANJUNG.,SIP) :

Pak Sipahutar sebentar dahulu ya.

Kita pernah dengan kapal apa ya mungkin dari Ibu Susi ya, di perbatasan Singapura Komisi I DPR RI sama Angkatan Laut sama dari Perikanan kalau tidak salah kita langsung menuju titik koordinat perbatasan dengan Singapura waktu itu. Pertama dengan sebelah barat eh timur yang juga link dengan Malaysia. Apa kira-kira ini kita bisa tinjau dengan kapal ini tidak atau takut dengan Abu Sayap tidak tahu ini Pak Marjo Angkatan Laut ini. Ini mungkin perlu juga karena ribuan loh suku kita di sana itu, kita kok terus seperti itu.

Pak Minto bagaimana ini apa dengan Bakamla *cost guard* kita yang sudah internasional sekarang. Kita belum lama kalau tidak salah naik kapal ke perbatasan dengan Singapura. Nah ini mungkin juga perlu ini, ini ada Angkatan Laut ini, masa takut dengan Abu Sayap, ya kita ke sanalah sekali-sekali ya kan? Biar tahu, ya biar jelas ini anggota DPR-nya ikutlah, Pak Supiadin sudah pernah ke sana. Nah ini mungkin Pak Sipahutar ya.

Silakan.

DEPUTI IV PERTAHANAN POLHUKAM (LAKSDA TNI DR.H.SIPAHUTAR) :

Ya pak kita akan *arrange*, ke depan mungkin kita akan laksanakan.

F-PAN (IR.ALIMIN ABDULLAH) :

Sedikit pimpinan.

Ini saya baru di Komisi I DPR RI tetapi saya lihat tahunnya luar biasa ini. Baru beberapa bulan yang lalu kita sempat ke perbatasan dengan Singapura sekarang baru Filipina. Mungkin sekarang baru kita merasakan menjadi prioritas buat kita menyelesaikan perbatasan. Jadi Pak Ferry mumpung masih waktunya ini eranya jangan masalah ini. Karena termasuk juga tadi masalah penduduk itu pak, apa yang bapak katakan di Kurdi itu bukan mustahil akan terjadi di kita pak. Begitu mereka berkembang, beranak pinak punya aset, satu wilayah Singapura juga begitu pak. Makanya ini dahulu kan di bawah Malaysia, Melayu kalau dia cukup banyak di satu tempat di satu pulau bisa ribut meng-claim.

Nah jadi sebelum itu terjadi mumpung batas sudah jelas, saya kira memang harus ada 1 tim yang membahas bagaimana penyelesaian yang terbaik, bahwa bisa saja warga negara lain hidup di tempat kita dan warga negara kita hidup di tempat lain itu hal yang biasa. Sebagaimana kita pernah menyelesaikan dengan China waktu dahulu, Taiwan apa dahulu dengan bapak ibu Komisi X.

Saya kira ini merupakan kewajiban juga dari Pak Ferry karena itu menyangkut perjanjian internasional mengenai perbatasan dan juga mengenai hubungan penduduk kita. Sebab jangan sampai setelah banyak masalah baru kita agak serius lagi melihatnya, mudah-mudahan begitu ya Pak Ferry.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik mungkin masih ada tambahan?

Baik kalau tidak ada pertama-tama kami ucapkan terima kasih, banyak masukan. Oh ya silakan.

IMIGRASI :

Mohon izin menerangkan terkait dengan penjelasan mengenai status kewarganegaraan Indonesia yang di Filipina. Jadi kami dari Imigrasi bahwa memang keberadaan beberapa warga negara kita khususnya di Filipina itu memang sudah mulai dilaksanakan awal inisiasi program registrasi itu tahun 2012, waktu itu diinisiasi oleh KJRI Davao melalui kunjennya dan juga melalui atase imigrasi berkerjasama dengan UNHCR untuk melaksanakan registrasi terkait dengan persoalan namanya mereka menyebut adalah *people of indonesian descent* atau keturunan Indonesia yang ada di Filipina pak. Dan perjanjian itu kerangka itu sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1975 itu ada namanya *Letter of Instruction* nomer 720, 11 April 1975 yang melalui mekanisme naturalisasi pak. Di situ inisiatifnya adalah Filipina namun kenyataan ini tidak dilakukan.

Kemudian dalam beberapa tahun kemudian tahun 1976 itu Filipina sudah melakukan *return migration* sebanyak 452 orang secara sukarela. Kemudian tahun 1977 juga 432 orang Indonesia. Tahun 1978 inisiasi itu kemudian dilakukan melalui pendaftaran ulang WNI dilakukan oleh KJRI Davao. Kemudian tahun 1979 melalui *return migration* 175 orang juga. Kemudian tahun 1980 melalui *return migration* sebanyak 210 orang sampai berikutnya sampai tahun 2011. Kemudian tahun 2012 inisiasi itu dilakukan oleh KJRI Davao bersama dengan UNHCR mendapatkan hampir sekitar 5000 *undocumented* WNI dan itupun juga diberikan pilihan baik oleh kedua belah pihak. Baik oleh pemerintah Filipina juga oleh pemerintah Indonesia jadi boleh memilih. Kalau mereka memilih menjadi warga negara Filipina mereka akan diberikan paspor daripada pemerintah Filipina tetapi kemudian kalau mereka memilih sebagai warga negara Indonesia mereka akan diberikan *align registration* dari pemerintah Filipina. Tetapi tetap diputihkan bahwa mereka adalah tetap sebagai penduduk Indonesia yang legal yang berada di wilayah Filipina pak.

Terus kemudian dari hasil registrasi yang dilakukan terakhir tanggal 3 Maret 2016 oleh KJRI Davao di situ ada per provinsi yaitu di kota Batu Utara ada 133 orang. Kemudian di kota Davao City ada 279 orang, kemudian di Davao Oriental ada 679 dan di beberapa negara mungkin data ini bisa kami sampaikan kepada ketua dari Kemlu untuk nanti bisa disampaikan.

Yang terakhir adalah bahwa opsi solusi yang diberikan oleh pemerintah Filipina dengan Indonesia adalah untuk warga negara Indonesia yang akan tetap menetap di Mindanao, tindak lanjutnya adalah tetap diberikan penegasan kewarganegaraan kemudian juga diberikan paspor terkait dengan dispensasi. Kemudian pemutihan izin keimigrasian oleh pemerintah Filipina dan juga diberikan visa residence atau visa menetap di Filipina. Tetapi kalau untuk WNI yang mau pulang ke Indonesia diberikan kewarganegaraan RI melalui Direktorat Jenderal 1 Kemenkumham. Kemudian akan diberikan SPLP yang diberikan oleh KJRI Davao dan proses pemulangan dari pihak KJRI dari kita.

Kemudian ada beberapa warga negara yang memang sudah menyatakan bahwa dia sebagai warga negara Filipina. Jadi mereka sudah mengaku sebagai warga negara Filipina tetapi tetap mau menetap di Mindanao dan pasti akan diberikan status kewarganegaraan Indonesia untuk dicabut, dokumennya sebagai warga negara Indonesia.

Kemudian yang terakhir adalah untuk jadi 4 wilayah yang memang banyak sekali dilakukan registrasi ini adalah di wilayah Pulau Baluk kemudian Pulau Sarange kemudian Davao City dan juga Davao Oriental. Di sini merupakan komoditas yang terbesar dari tipe Indonesian Descent tersebut. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan untuk status kewarganegaraan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Baik berdasarkan pengalaman kami pernah menyusuri ke Davao Selatan memang tidak mudah, kami dikawal oleh pihak keamanan di sana dikawal 3 orang, menyampaikan pak tidak cukup kalau dikawal 3 orang. Ya berapa saya sampaikan. Paling tidak 1 pleton. Bisa tidak 1 pleton ngawal kami? Kebetulan dari Komisi I DPR RI yang masuk ke sana, waktu itu yang siap ya mantan-mantan prajurit 3 orang, saya, Pak Yahya dengan Pak Salim Mengga begitu masuk ke sana. Tetapi menarik kami ketemu di barak-barak mereka kemudian juga cukup *familiar* walaupun bahasa Indonesianya sudah campur dengan bahasa Tagalog. Mungkin ini menjadi PR kita. PR dari Kemenlu untuk juga dari Imigrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kalau terus berlanjut mungkin mereka sudah mulai dewasa, ada dewasa yang sudah pelajar SMA steples dan itu mungkin repot nanti ketika akan melaksanakan pernikahan dan sebagainya dan sebagainya.

Baik bapak dan ibu yang kami hormati.

Kalau tidak ada lagi pertama kami mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang cukup baik dan berharga untuk pengambilan keputusan kami. Kemudian terima kasih kembali atas kehadirannya dan sebagai catatan apabila tidak terdapat hal yang perlu didalami lagi terkait dengan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia-Filipina, kami Komisi I DPR RI merencanakan Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah dalam hal ini mohon disampaikan kepada bagian masing-masing, Menlu, Menhan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menkumham, 4 menteri. Dalam rangka pembicaraan tingkat 1 untuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia-Filipina pada hari Selasa.

Jadi mohon disampaikan kepada yang mewakili Menlu, Menhan, Menteri Kelautan dan Menkumham, pada Selasa 25 April 2017 dengan agenda pertama itu adalah penjelasan pemerintah. Yang kedua pandangan umum fraksi-fraksi, yang ketiga pembahasan DIM, tidak banyak DIM-nya sedikit ya karena ini ratifikasi. Kemudian pendapat akhir fraksi-fraksi kemudian pendapat akhir dari pemerintah dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan draft. Sesudah itu selesai mudah-mudahan bisa dilaksanakan tanggal 25 April karena kami tanggal 28 itu akan menutup sidang. Karena tanggal 29 dan selanjutnya kami akan reses kembali ke daerah masing-masing.

Saya kira ini saja dan terima kasih dan mohon berkenan untuk makan siang bersama. Baik mungkin dari pemerintah.

DIRJEN HPI KEMLU (FERRY ADAMHAR.,SH.,LL.M) :

**Terima kasih bapak pimpinan sidang,
Dan anggota yang kami muliakan.**

Atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih atas apa yang kita lakukan hari ini pak yang sangat valueable bagi kita dalam rangka memenuhi proses konsistusi, meratifikasi kesepakatan yang telah kita buat dengan negara tetangga di bidang perbatasan laut yaitu EEC. Tentu dengan sendirinya kami akan melaporkan pak kepada atasan kami pak mengenai program ke depannya. Insya Allah dengan ini merupakan langkah besar bagi kita untuk sama-sama menertibkan ini. Demikian pak dengan ini kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR.TB.HASANUDDIN.,MM) :

Terima kasih.

Dengan demikian RDP kami tutup dengan mengucapkan *Wassalamualaikum Wr Wb.*

Jakarta, 18 April 2017
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P.
NIP. 19710106 199003 2 001